

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan posisi laki-laki sebagai sosok otoritas utama dalam organisasi social (Nurmila, 2015). Posisi laki-laki dinilai lebih tinggi di banding perempuan dalam berbagai aspek. Konsep patriarki nyatanya menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, yang kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi. Kedua, menarik perhatian pada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem social. Patriarki dapat tumbuh dengan kuat pada lingkungan yang juga mendukung patriarki tersebut tetap ada, patriarki yang merupakan suatu sistem sosial yang di bangun sama halnya dengan gender, kuat tidaknya pengaruh patriarki dalam sebuah masyarakat atau ruang lingkup negara bergantung kepada bagaimana hubungan sistem tersebut dengan masyarakat.

Ketidakadilan gender dapat dirasakan baik laki-laki maupun perempuan, namun yang lebih sering menjadi korban dari ketidakadilan tersebut ialah perempuan. Menurut laporan kesenjangan gender tahun 2020 oleh *World Economic Forum* sampai saat ini masih ada kesenjangan gender sebesar 31,4 % yang masih ditutup secara global dengan kesenjangan pemberdayaan politik di urutan pertama diikuti oleh partisipasi dan kesempatan ekonomi di urutan kedua serta pencapaian Pendidikan dan kelangsungan hidup berada di urutan ketiga dan urutan keempat, serta pencapaian Pendidikan dan kelangsungan hidup berada di urutan ketiga dan urutan keempat (World Economic Forum, 2019). Peningkatan

tersebut dirancang untuk menciptakan kesadaran global tentang kesenjangan gender dan peluang yang diciptakan untuk menguranginya.

Anggapan laki-laki yang selalu merasa menduduki posisi paling tinggi dalam masyarakat seolah membuat perempuan merasa terdiskriminasi, tak jarang diskriminasi tersebut menuju pada suatu Tindakan yang menyimpang seperti pelecehan hingga kekerasan seksual. Kekerasan gender sering disebabkan oleh bias gender yang disebut dengan *gender-related-violence* atau ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Umniyyah, 2021). Seperti yang dilansir dari laman *un.women.org* di salah satu artikelnya yang berjudul *Facts and Figures: Ending Violence Against Women* disebutkan ada 35% perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan maupun non-pasangan. Angka tersebut tidak termasuk dalam pelecehan seksualnya. Beberapa peneliti nasional menyebutkan hampir 70% perempuan mengalami HIV, depresi hingga aborsi akibat kekerasan dan pelecehan seksual.

Tindakan diskriminasi yang terjadi membuat seluruh perempuan beserta Gerakan feminis di seluruh dunia semakin gencar untuk menyuarakan ketidakadilan, agar perempuan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat serta terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme adalah sebuah paham atau Gerakan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Disepanjang sejarah perkembangannya secara kental diwarnai oleh teori dan Gerakan feminis dari barat yang kemudian menjadi acuan melanjutkan perjuangan bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan manusia di hampir seluruh dunia. Isu-isu tentang perempuan yang diusung oleh feminis di dalam teori sosial sesungguhnya bukan

sebuah gagasan baru, namun tidak bisa juga dikatakan ide yang telah ada sejak awal mula perkembangan teori sosial. Teori feminisme bisa ditandai sebagai buah pemikiran yang lahir dari fiksi sosial yang kemudian turut menyebar di dunia akademis barat sejak dalam nuansa borjuis liberal, dimana masyarakat mau tak mau harus mengubah pemahamannya tentang konsep gender dan warga negara dalam menjawab tuntutan kaum feminis, bersamaan dengan perkembangan kondisi sosial (Ni Komang Arie Suwastini, 2013).

Gerakan #MeToo merupakan Gerakan sosial oleh perempuan dan kelompok feminis untuk melawan Tindakan kekerasan seksual, juga sebagai bentuk solidaritas terhadap korban. Frasa #MeToo berasal dari dua kata Bahasa Inggris yang terdiri dari me dan too (tidak bersambung) kata me memiliki arti “saya/aku” dan too memiliki arti kata “juga”, secara harfiah “me too” memiliki arti kata “saya juga, kalimat me too juga merupakan kata sifat dengan maksud sebagai kalimat persetujuan dalam percakapan. #MeToo sendiri didirikan oleh Tarana Burke pada 2006, seorang aktivis perempuan yang juga pendiri organisasi non-profit Just Be Inc. Kata “Me Too” muncul pada tahun 1997 setelah Burke mendengar cerita dari seorang gadis muda korban pelecehan seksual saat ia bekerja sebagai konselor kamp pemuda (Bhattacharyya, 2018). Burke kemudian meluncurkan kampanye #MeToo di MySpace serta di ruang kelas sekolah menengah, dimana ia bekerja dengan perempuan dan gadis kulit hitam untuk mengembangkan kurikulum tentang topik-topik kekerasan seksual. Ia mengatakan, gerakan #MeToo bertujuan untuk memberikan empati kepada para korban kekerasan di dunia dan tidak ingin korban merasa sendirian.

PBB kemudian menetapkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), kemudian perjanjian tersebut diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Yang juga dikenal sebagai “RUU hak internasional untuk perempuan”, CEDAW telah memberikan validasi juga dukungan internasional terhadap kesetaraan gender. Lebih penting lagi, CEDAW telah mengkodifikasikan standar hukum internasional seputar hak-hak perempuan untuk mengambil bagian dalam setiap aspek kehidupan sebagai bentuk kesetaraan dengan laki-laki. Tujuan disetujuinya CEDAW adalah untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB (*UN Commission on the status of women*) sebuah badan yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan.

CEDAW tidak hanya merupakan sebagai kebijakan luar negeri yang penting, tetapi pada saat penilaian publik terhadap gerakan BLM (*Black Lives Matter*) dan #MeToo, CEDAW juga akan berfungsi sebagai kendaraan penting untuk mengatasi diskriminasi institusional dan struktural yang ada terhadap perempuan melalui lensa titik-temu. Bahkan Para ahli pakar PBB sendiri memuji gerakan tersebut, yang dikenal dengan tagar media sosial MeToo, sebagai bentuk kritis bagi hak-hak perempuan dan menawarkan dukungan penuh terhadap mekanisme hak asasi manusia PBB. Dengan munculnya gerakan ini, para ahli mengatakan rasa malu dan takut mulai berpindah dari korban kepada pihak pelaku kekerasan seksual yang harus menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka yang tidak dapat diterima dalam banyak kasus dan tindak pidana.

Setelah 11 tahun berlalu, tagar #MeToo muncul Kembali setelah pengakuan dari seorang aktris Hollywood Allysya Milano yang mendapatkan pelecehan seksual di dalam studio tempat kerjanya oleh seorang produser Harvey Weinstein pada tahun 2017. Kemudian, ia meminta pengikutnya untuk membalas tweetnya dengan tagar #MeToo jika mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual. Dengan banyaknya pengikut Allysya Milano yang membalasnya melalui media sosial tagar ini menyebar secara global melalui twitter, facebook dan Instagram. Setelah tagar ini menyebar secara cepat ke penjuru dunia dan menyebar ke dalam puluhan Bahasa, Tarana Burke baru menyebutnya sebagai Gerakan internasional untuk menyuarkan keadilan bagi orang-orang yang merasa terkucilkan oleh orang-orang sekitar. Bahkan tagar ini tidak hanya mendapat respon dari perempuan yang pernah mendapat kekerasan seksual di tempat kerja, tetapi hal ini juga mendapat reaksi dari laki-laki yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam kehidupannya.

Gerakan #MeToo di Amerika Serikat juga terwujud secara bersamaan untuk memperjuangkan satu tujuan yang sama yakni memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif dan lebih adil khususnya kepada para korban (*Fenni Ratna*, 2019). Momentum #MeToo yang telah terjadi secara mendunia tentunya meningkatkan kesadaran nasional di Amerika Serikat. Ketika masyarakat mulai bersuara memajukan isu secara cepat maka hal ini akan menjadi sinyal bagi actor negara untuk dapat menyikapi permasalahan tersebut. Di Amerika Serikat sendiri dampak dari momentum #MeToo telah mendorong peningkatan laporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual sehingga laporan di berbagai bidang industry dapat terungkap. Sebelumnya terjadi perjanjian rahasia antar korban dan pelaku, perjanjian tersebut berupa penyelesaian masalah dengan

meminta korban untuk tetap diam dan tidak menceritakan kejadian pelecehan dan kekerasan seksual kepada orang lain. Tetapi Ketika Gerakan #MeToo mendapat perhatian, beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang yang melarang penggunaan perjanjian kerahasiaan dalam kasus pelanggaran seksual.

Korea Selatan merupakan sebuah negara yang berada di Asia Timur tepatnya dibagian semenanjung selatan berbatasan dengan Korea Utara. Korea Selatan memiliki system keluarga Hojeok yaitu system keluarga patriarki yang dibangun diatas system keluarga konfusianisme. Konfusianisme merupakan ajaran filosofi moral yang masuk ke Korea dari masa kerajaan Silla, Goguryeo, dan Baekje. Selama berabad-abad ajaran ini memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Korea baik dalam bidang politik, social maupun budaya. Dalam Konfusianisme juga terdapat Falsafah “Pria Tinggi, Perempuan Rendah” yang menjadi fondasi laki-laki mendominasi perempuan. Ajaran konfusianisme ini berperan dengan menjalankan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki. Peran perempuan yang dianggap terbatas dan juga posisinya yang rendah dihadapan ajaran konfusianisme membuat perempuan menjadi kaum minoritas. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tersebar ke seluruh bidang dalam masyarakat. Perempuan sebagai kaum minoritas dianggap kehidupannya memang di sumbangsih oleh laki-laki serta harus mengikuti suami dan keluarga suami (Afiati, 2021).

Pada akhir Januari 2018 Gerakan #MeToo berkembang di Korea Selatan, tagar ini diawali dari pengakuan seorang jaksa penuntut umum, Seo Ji-Hyun dimana ia mengumumkan secara terbuka bahwa seorang Jaksa Senior, Ahn Tae-Geun melakukan Tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya pada tahun 2010.

Tindakan Seo Ji-Hyun ini diakui karena terinspirasi dengan Gerakan #MeToo yang dimulai di Amerika Serikat. Dari tindakannya tersebut ia pun mendapat dukungan juga tautan publik yang meminta diadakannya penyelidikan. Ratusan orang muncul dengan teriakan #MeToo mereka sendiri. Dalam dunia budaya, seorang penyair Wanita Choi Young-Mi menuduhkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyair Ko Eun terhadap dirinya melalui syair yang ia tulis berjudul “Monster”. Akibat dari tindakannya ini, pamor penyair Ko Eun yang disebut-sebut sebagai calon hadiah penghargaan nobel kesusteraan Korea dibatalkan. Pada dunia perfilman, actor Oh Dal-Soo, Cho Jae-Hyun dan sutrada Kim Ki-Deok juga dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual. Di dunia politik, mantan gubernur Chungcheong Selatan Ahn Hee-Jung yang akan mencalonkan diri sebagai presiden dituduh oleh sekretarisnya Kim Ji-Eun dengan tuduhan kekerasan seksual yang dilakukannya.

Gerakan #MeToo berkembang secara cepat dan juga memiliki pengaruh yang besar, ribuan orang turun ke jalan untuk berkampanye selama beberapa hari. Melihat bagaimana besarnya Gerakan #MeToo di Korea Selatan menjadi media untuk bersuara menggambarkan kesadaran masyarakat khususnya kelompok perempuan atas pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi, Gerakan ini juga mendapat dukungan khusus dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-In. Dalam pidatonya ia menyebutkan adanya Gerakan #MeToo membawa perubahan penting, gerakan ini memimpin Korea menuju masyarakat dimana kesetaraan seksual dan hak-hak perempuan diwujudkan dan martabat semua orang harus dihormati.

Alasan peneliti memilih Korea Selatan sebagai negara yang ingin diteliti mengenai Gerakan sosial #MeToo dikarenakan Gerakan tersebut memiliki makna yang besar di Korea Selatan, gerakan feminis di negara-negara Amerika dan Eropa

bukanlah suatu hal yang baru namun tidak di negara Asia. Korea Selatan sendiri masih kental dengan budaya patriarki, negara dengan perekonomian terbesar no 12 di dunia berdasarkan PDB ini masih cukup rendah tentang kesadaran terhadap kesetaraan gender. *World Economic Forum* membandingkan partisipasi perempuan dengan laki-laki dalam Laporan Kesenjangan Gender Global tahun 2018. Mereka menemukan fakta bahwa perempuan mendapat posisi rendah dalam semua kategori. Kesenjangan pendapatan membuat Korea Selatan menduduki peringkat 121 dari 149 negara perihal kesetaraan ekonomi (World Economic Forum, 2019) . Menurut Bank Dunia hanya ada 17% perempuan yang menjabat sebagai anggota parlemen di Korea Selatan.

Dalam temuan menunjukkan bahwa secara statistic persentase kejahatan pelecehan seksual berada di tingkat yang mengkhawatirkan dari 98% pelaku adalah laki-laki dan 86% korban adalah perempuan dengan tingkat kejahatan pelecehan seksual yang dilaporkan mencapai tingkat yang mencengangkan yaitu 3-4 kasus yang dilaporkan setiap jam. Tingginya tingkat kejahatan seksual di Korea Selatan menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan kekuatan gender di negara tersebut. Salah satu tempat yang paling sering terjadinya tindakan kekerasan seksual adalah di tempat kerja. Dalam kondisi masyarakat di Korea saat ini, persaingan untuk mendapat pekerjaan dan kondisi tempat kerja hampir tak bertanggung membuat perempuan dalam kondisi sulit. Sebuah survei yang dilakukan antara Wanita pekerja menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh Wanita dilaporkan diserang secara seksual atau dilecehkan didalam atau diluar pekerjaan oleh rekan kerja. Pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja terjadi di berbagai kalangan sampai pemerintah. Walikota Seoul, Park Wong Soon yang juga merupakan

seorang aktivis senior dan seorang pengacara hak asasi manusia ditemukan tewas bunuh diri setelah tuduhan pelecehan seksual oleh sekretarisnya.

Kasus kejahatan seksual tersebut hanya sedikit dari banyaknya kasus yang menggambarkan bagaimana diskriminasi gender di tempat kerja Korea. Aspek yang dipertanyakan dari masalah ini adalah bahwa 78% Wanita memilih untuk merahasiakan penyerangan mereka dan hanya 22% yang mengambil Tindakan terhadap penyerang mereka. Sejarah Korea yang tertanam konfusianisme, dimana hierarki mendominasi segalanya, pola pikir ini mendorong lingkungan yang didominasi laki-laki dan menahan perempuan untuk berbicara. Terdapat banyak Tindakan yang dapat dikategorikan dalam pelecehan seksual : pemerkosaan, prostitusi, pornografi hingga perkataan kasar. Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan tidak hanya dilakukan di dalam satu situasi dimana pelaku dan korban saling berinteraksi. Salah satu kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di Korea Selatan adalah rekaman tersembunyi (*molka*) baik di ruang privat maupun di ruang umum, seperti kamar mandi, stasiun kereta dan ruang ganti. Rekaman tersebut biasanya diperjualbelikan pada situs khusus.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Korea Selatan memicu besarnya Gerakan #MeToo di Korea Selatan. Gerakan #MeToo di Korea Selatan membantu kelompok perempuan yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat bersuara demi mendapat keadilan yang diinginkan, Gerakan ini juga membuka kasus pelecehan seksual yang belum terungkap di Korea Selatan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti Bagaiman Dampak Gerakan #MeToo sebagai Gerakan Sosial dalam Melawan Kekerasan Seksual di Korea Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana asal mula munculnya Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan?
2. Apakah efektif Gerakan Sosial #MeToo yang dilakukan melalui media online dan aksi langsung di Korea Selatan?
3. Bagaimana dampak Gerakan Sosial #Metoo di Korea Selatan?

1.2.1 Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah fenomena yang terjadi di seputar penelitian, maka peneliti membatasi pembahasan dengan lebih menitikberatkan dampak apa yang telah dilakukan Gerakan Sosial #MeToo dalam meningkatkan kesadaran bahayanya kekerasan seksual di Korea Selatan pada Tahun 2018-2020.

1.2.2 Perumusan Masalah

Guna memudahkan dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana dampak Gerakan Sosial #MeToo dalam Melawan Kekerasan Seksual di Korea Selatan?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui munculnya Gerakan Sosial #Metoo di Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas Gerakan #MeToo melalui media online dan aksi langsung di Korea Selatan.
3. Untuk mengetahui dampak Gerakan social #MeToo di Korea Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan referensi serta media informasi bagi perkembangan Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Secara praktis, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Gerakan social #MeToo khususnya di Korea Selatan.
3. Secara akademis, penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1), sesuai dengan standar perkuliahan yang ditetapkan oleh Universitas Pasundan.